

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses-proses dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi di Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Manifestasi politisasi birokrasi di Kabupaten Lampung Selatan antara lain yaitu :
 - a. Pergantian pejabat struktural secara besar-besaran yang diintervensi oleh politik. Resuffle dalam jajaran birokrasi di Lampung Selatan berulang kali dilakukan untuk menempatkan orang-orang pilihan Bupati ke dalam jajaran birokrasi.
 - b. Komersialisasi jabatan dalam penempatan jabatan yang dilakukan oleh tim sukses Bupati terhadap oknum-oknum pejabat. Bentuk lainnya yaitu adanya instruksi dari Bupati melalui Kepala Dinas kepada satker-satker untuk menyetorkan sejumlah uang, yang tujuannya adalah untuk mengamankan posisinya dalam birokrasi.

- c. Adanya politik transaksional atau politik balas jasa dalam penempatan pejabat-pejabat di posisi tertentu dalam jajaran Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Hal tersebut merupakan bentuk imbalan yang diberikan Bupati kepada pejabat yang bersangkutan sebagai upah atas kerja kerasnya mengantarkan Bupati menempati posisinya saat ini.
 - d. Marginalisasi Baperjakat dalam mekanisme penempatan jabatan struktural di jajaran Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Mekanisme yang terjadi justru kebalikan dari mekanisme yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi politisasi birokrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, antara lain:
- a. Kepentingan kekuasaan atau politik dari Bupati Lampung Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat dan mengamankan posisinya sebagai kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Hubungan patron client antara Kepala Daerah dan para birokratnya. Hubungan ini merupakan bentuk loyalitas birokrat terhadap pemimpinnya dengan imbalan jabatan yang lebih tinggi atau sekedar mengamankan posisi birokrat tersebut dalam jajaran Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
 - c. Nuansa nepotisme yang masih kental terasa dalam penempatan jabatan-jabatan struktural dalam lingkungan Pemda. Bupati lebih mengutamakan menempatkan pejabat-pejabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengannya.

- d. Menguatnya Neo Feodalisme atau pewarisan kekuasaan yang dilakukan Gubernur terhadap Bupati Lampung Selatan. Hal tersebut didasarkan karena Gubernur ingin memperluas kekuasaannya dengan mengarahkan Bupati Lampung Selatan untuk mewarisi kekuasaannya pada periode berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Para birokrat atau PNS diharapkan dapat lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparat pemerintah yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat. Untuk itu PNS harusnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Pemerintah harusnya berpedoman kepada Undang-undang dan aturan yang berlaku dalam proses reformasi birokrasi, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur dan tatanan birokrasi yang nantinya akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Peran aktif masyarakat, pers, media, LSM, aparat yang berwenang, dan setiap lapisan elemen masyarakat lebih ditingkatkan dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan.